KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)
Vol.4, No.1 Januari 2027
e-ISSN: 3047-7603, p-ISSN :3047-9673, Hal 283-293
DOI : https://doi.org/10.61722/jinu.v4i1.13391

Mencegah Korupsi Sebelum Menjadi Kebiasaan: Tinjauan Psikologi Sosial, Moral, dan Pembentukan Perilaku Integritas

Mufidah Nur Komaryati[1], Aos Kuswandi[2]
[1] Universitas Muhammadiyah Indonesia
[2] Universitas Muhammadiyah Indonesia
nfida0507@gmail.com, aos_kuswandi@umindonesia.ac.id

Abstract *Corruption is a social problem that involves not only the abuse of power and public finances but also moral values, cognitive processes, and individual behavioral development. Dishonest behaviors in everyday life, such as cheating, lying, plagiarism, and misuse of facilities, represent integrity-related concerns that require early attention. This study aims to examine corruption prevention from psychological perspectives, particularly social psychology, moral psychology, and educational psychology. The research employs a literature review method by examining Indonesian journal articles published between 2021 and 2026 and relevant institutional publications. The findings indicate that dishonest behavior is associated with moral disengagement, social norms, environmental pressures, and moral identity formation. Previous studies also suggest that academic dishonesty may be associated with individuals' tendencies to justify actions that contradict moral standards. Therefore, anti-corruption education should focus not only on increasing knowledge but also on developing honest habits, moral awareness, role modeling, and social environments that support integrity. Corruption prevention should begin early through the involvement of families, educational institutions, and communities.*
Keywords*: anti-corruption education; corruption; integrity; moral psychology; social psychology.*

Abstrak Korupsi merupakan permasalahan sosial yang tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan negara, tetapi juga berhubungan dengan nilai moral, proses kognitif, serta pembentukan perilaku individu. Perilaku tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyontek, berbohong, melakukan plagiarisme, dan menyalahgunakan fasilitas, merupakan persoalan integritas yang perlu mendapatkan perhatian sejak dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pencegahan korupsi melalui perspektif psikologi, khususnya psikologi sosial, psikologi moral, dan psikologi pendidikan. Penelitian menggunakan metode kajian pustaka (literature review) dengan menelaah artikel jurnal nasional terbitan 2021–2026 serta publikasi kelembagaan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perilaku tidak jujur berkaitan dengan mekanisme moral disengagement, pengaruh norma sosial, tekanan lingkungan, serta pembentukan identitas moral. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa ketidakjujuran akademik dapat berkaitan dengan kecenderungan individu membenarkan tindakan yang bertentangan dengan standar moral. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi perlu diarahkan bukan hanya pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada pembiasaan perilaku jujur, pengembangan kesadaran moral, keteladanan, dan pembentukan lingkungan sosial yang mendukung integritas. Pencegahan korupsi perlu dimulai sejak dini melalui keterlibatan keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
Kata kunci: integritas; korupsi; pendidikan antikorupsi; psikologi moral; psikologi sosial.

1. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan persoalan sosial yang dapat menghambat pembangunan, merusak kepercayaan masyarakat, serta menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan. Selama ini, korupsi sering dikaitkan dengan individu yang memiliki jabatan, kewenangan, atau akses terhadap sumber daya publik. Namun, apabila ditinjau melalui perspektif psikologi, perilaku yang berkaitan dengan ketidakjujuran juga dapat dipahami melalui proses pembentukan nilai, pengambilan keputusan moral, dan pengaruh lingkungan sosial.

Naskah Masuk: 11 November 2026; Revisi: 12 November 2026; Diterima: 13 November 2026; Terbit: 14 November 2026

Perilaku koruptif tidak dapat secara langsung disamakan dengan tindakan tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, kebiasaan menyontek, memanipulasi informasi, berbohong untuk menghindari tanggung jawab, dan mengambil sesuatu yang bukan hak merupakan contoh persoalan integritas yang perlu diperhatikan. Apabila perilaku tersebut terus dimaklumi, individu berpotensi mengembangkan toleransi terhadap pelanggaran norma.

Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) menunjukkan bahwa Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) Indonesia pada 2024 mencapai 3,85 pada skala 0–5. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 3,92. Berdasarkan tingkat pendidikan, kelompok masyarakat dengan pendidikan di atas SMA memperoleh IPAK sebesar 3,97, kelompok SMA sebesar 3,87, dan kelompok di bawah SMA sebesar 3,81. Data tersebut memberikan gambaran mengenai perbedaan indeks perilaku antikorupsi berdasarkan tingkat pendidikan. Namun, angka tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa pendidikan secara langsung menyebabkan seseorang memiliki integritas lebih tinggi.

Permasalahan integritas juga terlihat dalam lingkungan pendidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2024) melalui Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024 melaporkan bahwa 44,75% pelajar dan mahasiswa mengaku pernah menyontek meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut tidak benar. Sementara itu, 44,59% mahasiswa mengaku pernah melakukan plagiarisme walaupun memahami bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran.

Dalam bidang psikologi, fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui konsep moral disengagement. Konsep ini menjelaskan mekanisme kognitif yang memungkinkan individu membenarkan tindakan yang bertentangan dengan standar moralnya. Penelitian Surongku dkk., (2025) pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Bosowa menemukan bahwa moral disengagement berkaitan dengan pelanggaran akademik mahasiswa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan intelektual tidak selalu berjalan searah dengan konsistensi perilaku moral.

Selain faktor individu, lingkungan sosial juga berperan dalam pembentukan perilaku. Manara dkk., (2024), melalui penelitian terhadap 116 pekerja organisasi publik, menemukan bahwa norma deskriptif memiliki peran signifikan dalam memprediksi perilaku korupsi. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi individu mengenai perilaku

yang umum dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya dapat berkaitan dengan keputusan perilakunya sendiri.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pencegahan korupsi perlu dilakukan melalui pendekatan psikologis yang menekankan pembentukan identitas moral, kesadaran diri, pengendalian perilaku, dan pembiasaan nilai integritas. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara faktor psikologis dan pembentukan perilaku antikorupsi serta menjelaskan peran keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam membangun budaya integritas sejak dini.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian ini bertumpu pada perspektif psikologi moral dan psikologi sosial. Psikologi moral menjelaskan bahwa perilaku individu berkaitan dengan penilaian terhadap benar dan salah, kesadaran atas konsekuensi tindakan, serta kesesuaian tindakan dengan nilai yang diyakini. Salah satu konsep yang digunakan adalah moral disengagement atau pelepasan moral, yaitu mekanisme kognitif yang memungkinkan individu membenarkan tindakan yang bertentangan dengan standar moral.

Perspektif psikologi sosial menempatkan norma, interaksi kelompok, dan respons lingkungan sebagai faktor yang berkaitan dengan perilaku individu. Selain itu, pembentukan integritas dipahami sebagai proses yang berlangsung melalui pembiasaan, keteladanan, dan lingkungan keluarga serta pendidikan yang mendukung kejujuran dan tanggung jawab.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian pustaka (literature review). Kajian dilakukan melalui penelusuran artikel jurnal nasional yang relevan dengan tema korupsi, integritas, ketidakjujuran akademik, psikologi moral, psikologi sosial, dan pendidikan antikorupsi.

Literatur utama diprioritaskan pada publikasi tahun 2021–2026. Sumber diperoleh melalui penelusuran jurnal ilmiah Indonesia, antara lain Jurnal Psikologi, Jurnal Psikologi Udayana, Jurnal Psikologi Karakter, Jurnal Pendidikan Tambusai, Paedagoria, dan Inovasi Kurikulum. Publikasi BPS dan KPK juga digunakan sebagai sumber data pendukung untuk menggambarkan kondisi perilaku antikorupsi di Indonesia.

Analisis dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, mengidentifikasi konsep dan hasil penelitian yang berkaitan dengan perilaku tidak jujur dan integritas. Kedua, mengelompokkan temuan berdasarkan faktor psikologis individu dan pengaruh lingkungan sosial. Ketiga, menyintesiskan hasil kajian untuk menjelaskan strategi pencegahan korupsi melalui pembentukan perilaku integritas. Hasil pembahasan tidak dimaksudkan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat secara langsung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4. 1 Ketidakjujuran Sehari-hari sebagai Persoalan Integritas dalam Perspektif Psikologi

Integritas merupakan keselarasan antara nilai yang diyakini individu dengan perilaku yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang memiliki integritas tidak hanya memahami perbedaan antara tindakan benar dan salah, tetapi juga berusaha mempertahankan prinsip moral ketika menghadapi situasi yang memberikan kesempatan untuk melakukan pelanggaran.

Dalam perspektif psikologi moral, perilaku seseorang tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan mengenai aturan, tetapi juga oleh bagaimana individu menilai suatu tindakan, memahami konsekuensinya, serta mempertimbangkan kesesuaian tindakan tersebut dengan nilai yang dimiliki.

Gambaran mengenai persoalan tersebut dapat ditemukan dalam penelitian Farisandy & Putri, t.t. (2024) yang mengkaji ketidakjujuran akademik Spada 182 mahasiswa Program Studi Psikologi di sebuah universitas. Hasil penelitian menunjukkan adanya perilaku menyontek, kolaborasi yang tidak diperbolehkan, dan plagiarisme. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa keinginan memperoleh nilai tinggi dan banyaknya tugas dari dosen menjadi faktor yang berkaitan dengan ketidakjujuran akademik.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perilaku tidak jujur dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Keinginan mencapai hasil tertentu dapat mendorong individu mengambil jalan pintas, sedangkan tekanan lingkungan dapat memperkuat kecenderungan melakukan pelanggaran.

4.2 Moral Disengagement: Mekanisme Psikologis yang Membenarkan Perilaku Tidak Jujur

Salah satu konsep psikologi yang relevan untuk menjelaskan perilaku tidak jujur adalah moral disengagement atau pelepasan moral. Konsep ini menjelaskan bagaimana individu menggunakan mekanisme kognitif untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan standar moral sehingga tindakan tersebut terasa dapat diterima.

Surongku dkk., (2025) melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap 15 mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok terarah (focus group discussion) dan wawancara individu. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara moral disengagement dengan pelanggaran akademik mahasiswa.

Hasil serupa ditemukan oleh Najarani dkk., (2025) dalam penelitian mengenai moral disengagement dan academic dishonesty pada mahasiswa. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi. Hasilnya menunjukkan bahwa moral disengagement memberikan kontribusi signifikan terhadap ketidakjujuran akademik, dengan nilai F sebesar 241,096 dan koefisien regresi B sebesar 0,838. Dalam kehidupan sehari-hari, mekanisme pelepasan moral dapat terlihat melalui beberapa bentuk pembenaran, antara lain:

a. Pembenaran moral: individu menganggap tindakan tidak jujur dilakukan untuk mencapai tujuan yang dianggap lebih penting.
b. Pengalihan tanggung jawab: individu merasa bahwa kesalahan terjadi karena mengikuti perintah atau kebiasaan kelompok.
c. Pengecilan dampak: individu menganggap pelanggaran tidak menimbulkan kerugian berarti.
d. Perbandingan sosial: individu merasa tindakannya masih dapat diterima karena orang lain melakukan pelanggaran yang lebih besar.
e. Penyalahgunaan atribusi: individu menyalahkan keadaan atau orang lain untuk menghindari tanggung jawab pribadi.

Sebagai contoh, seseorang yang memanipulasi laporan mungkin beranggapan bahwa tindakan tersebut hanya dilakukan untuk memenuhi target. Seseorang yang menyontek dapat menganggap tindakannya wajar karena hampir semua teman melakukan hal yang sama. Pembenaran tersebut dapat mengurangi pertentangan antara perilaku dan standar moral individu. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi perlu membantu seseorang

mengenali proses pembenaran yang digunakan ketika menghadapi kesempatan melakukan pelanggaran.

4.3 Norma Sosial dan Pengaruh Lingkungan terhadap Perilaku Korupsi

Psikologi sosial menjelaskan bahwa perilaku individu dapat dipengaruhi oleh norma, interaksi kelompok, serta respons lingkungan terhadap tindakan tertentu. Individu dapat menyesuaikan perilakunya dengan kebiasaan kelompok untuk memperoleh penerimaan sosial atau menghindari penolakan.

Manara dkk., (2024) meneliti hubungan norma deskriptif dengan perilaku korupsi serta peran kepemimpinan etis sebagai variabel moderator. Penelitian tersebut melibatkan 116 partisipan yang bekerja pada organisasi publik. Hasilnya menunjukkan bahwa norma deskriptif memiliki peran signifikan dalam memprediksi perilaku korupsi. Namun, kepemimpinan etis tidak terbukti memoderasi hubungan antara norma deskriptif dan korupsi.

Temuan tersebut memberikan gambaran bahwa perilaku individu tidak dapat dilepaskan dari persepsi mengenai tindakan yang dianggap umum di lingkungan sekitarnya. Ketika seseorang melihat bahwa pelanggaran sering dilakukan dan dibiarkan, terdapat kemungkinan bahwa perilaku tersebut mulai dianggap sebagai sesuatu yang normal.

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kondisi tersebut dapat terjadi ketika mahasiswa menganggap menyontek merupakan hal biasa karena banyak teman melakukannya. Oleh karena itu, pembentukan budaya antikorupsi memerlukan lingkungan sosial yang secara konsisten memperlihatkan, menghargai, dan menerapkan nilai kejujuran. Norma sosial yang mendukung integritas dapat menjadi salah satu unsur penting dalam pencegahan perilaku koruptif.

4.4 Keluarga dan Pendidikan sebagai Lingkungan Pembentukan Integritas

Keluarga merupakan lingkungan awal tempat individu mempelajari nilai, aturan, tanggung jawab, dan konsekuensi perilaku. Anak tidak hanya memperoleh pemahaman melalui nasihat, tetapi juga mengamati tindakan orang-orang yang berada di sekitarnya. Peran keteladanan juga didukung oleh penelitian Nursalim dkk., (2025) mengenai pola asuh dan keteladanan orang tua dalam pembentukan nilai antikorupsi anak di keluarga. Penelitian tersebut relevan untuk menunjukkan bahwa keluarga mempunyai posisi penting dalam proses penanaman nilai integritas melalui pola asuh dan contoh perilaku

sehari-hari. Peran keluarga kemudian diperkuat oleh lembaga pendidikan. Sekolah dan perguruan tinggi memiliki kesempatan untuk mengembangkan integritas melalui pembelajaran, keteladanan pendidik, aturan akademik, serta sistem yang menghargai proses.

Sakban dkk., (2025) meneliti pembiasaan karakter melalui pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Penelitian kualitatif tersebut melibatkan tujuh dosen yang terdiri atas dua ketua program studi dan lima pengampu mata kuliah pendidikan antikorupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi dapat digunakan sebagai sarana pembentukan karakter mahasiswa melalui pembiasaan nilai kejujuran, disiplin, kerja keras, kesederhanaan, kepemimpinan, dan kemandirian. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pendidikan karakter antikorupsi dalam memperkuat integritas di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa bentuk penerapan pendidikan integritas yang dapat dilakukan antara lain:

a. Membiasakan peserta didik mengerjakan tugas secara mandiri.
b. Mengembangkan budaya mengutip sumber dan menghindari plagiarisme.
c. Memberikan kesempatan kepada individu untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab.
d. Menerapkan transparansi dalam pengelolaan dana kegiatan.
e. Memberikan keteladanan dalam menaati aturan.
f. Menghargai proses dan usaha, bukan hanya hasil akhir.

4.5 Mengubah Kepatuhan karena Takut Hukuman Menjadi Kesadaran Moral

Kepatuhan terhadap aturan merupakan unsur penting dalam menjaga keteraturan sosial. Namun, perilaku yang hanya didasarkan pada ketakutan terhadap hukuman belum tentu menunjukkan bahwa nilai moral telah terinternalisasi. Individu mungkin tidak melakukan pelanggaran ketika berada di bawah pengawasan, tetapi dapat mengubah perilakunya ketika pengawasan tidak tersedia. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya membangun kesadaran moral sebagai dasar pengendalian perilaku.

Temuan Najarani dkk., (2025) mengenai hubungan moral disengagement dan ketidakjujuran akademik menunjukkan bahwa proses pembenaran moral berkaitan dengan kecenderungan melakukan tindakan yang bertentangan dengan integritas. Dengan

demikian, pendidikan antikorupsi perlu membantu individu mengenali alasan-alasan yang digunakan untuk membenarkan pelanggaran. Dalam praktiknya, perubahan dapat dimulai dengan membiasakan pertanyaan reflektif sebelum mengambil keputusan, seperti:

a. Apakah tindakan yang saya lakukan sesuai dengan nilai kejujuran?
b. Apakah keputusan tersebut merugikan atau mengambil hak orang lain?
c. Apakah saya bersedia bertanggung jawab atas tindakan tersebut?
d. Apakah saya tetap akan melakukan hal yang sama apabila tidak ada orang yang mengawasi?

Pertanyaan tersebut dapat membantu individu mengembangkan kesadaran terhadap konsekuensi moral dari perilakunya. Dengan demikian, tujuan pendidikan antikorupsi bukan hanya menghasilkan individu yang patuh terhadap aturan, tetapi juga individu yang memiliki tanggung jawab moral.

4.6 Peran Generasi Muda dalam Membangun Budaya Integritas

Generasi muda memiliki posisi penting dalam membangun budaya antikorupsi karena mereka akan menjadi bagian dari lingkungan sosial, dunia kerja, organisasi, dan lembaga publik pada masa mendatang. Dalam perspektif psikologi sosial, partisipasi individu dalam kelompok dapat menjadi sarana untuk memperkuat identitas dan norma bersama. Oleh sebab itu, keterlibatan generasi muda dalam kegiatan antikorupsi perlu diarahkan pada tindakan yang dapat diterapkan secara langsung.

Farisandy & Putri, t.t (2024) memperlihatkan bahwa ketidakjujuran akademik masih ditemukan di kalangan mahasiswa psikologi. Hal tersebut menjadi pengingat bahwa pendidikan integritas tidak cukup hanya diberikan melalui pengetahuan teoritis, tetapi juga perlu diterapkan dalam kehidupan akademik mahasiswa. Selain itu, media sosial dapat digunakan sebagai sarana menyebarkan informasi dan membangun kesadaran masyarakat. Namun, konsistensi antara pesan yang disampaikan dan perilaku nyata tetap menjadi unsur penting.

Gerakan antikorupsi yang efektif tidak hanya mengajak individu untuk menolak korupsi, tetapi juga menyediakan kesempatan bagi mereka untuk menerapkan kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

3.7 Strategi Pencegahan Korupsi Berdasarkan Perspektif Psikologi

Berdasarkan hasil kajian, pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui strategi yang mempertimbangkan faktor individu dan lingkungan sosial. Penguatan identitas moral, yaitu membantu individu memahami dan menginternalisasi nilai kejujuran, tanggung jawab, serta keadilan sebagai bagian dari konsep dirinya.

Pengembangan kesadaran moral, yaitu melatih individu untuk merefleksikan keputusan dan konsekuensi tindakan serta mengenali pembenaran yang dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran. Pembentukan norma sosial, yaitu menciptakan lingkungan yang memberikan penghargaan terhadap kejujuran dan tidak menormalisasi kecurangan. Hal ini relevan dengan temuan Manara dkk., (2024) mengenai peran norma deskriptif dalam memprediksi perilaku korupsi. Keteladanan, yaitu menerapkan konsistensi perilaku orang tua, pendidik, pemimpin organisasi, dan tokoh masyarakat. Temuan Nursalim dkk., (2025) serta Sakban dkk., (2025)memperkuat pentingnya pembiasaan dan keteladanan dalam pembentukan nilai integritas.

Sistem pengawasan dan transparansi, yaitu menyediakan pengendalian eksternal yang mendukung perilaku bertanggung jawab. Pengawasan perlu berjalan bersama pembentukan kesadaran internal agar perilaku jujur tidak hanya muncul ketika individu diawasi. Dengan menggabungkan strategi tersebut, pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui pendekatan yang lebih menyeluruh, yaitu dengan memperhatikan proses psikologis individu sekaligus kondisi lingkungan yang memengaruhi perilakunya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pencegahan korupsi perlu dipahami sebagai proses pembentukan perilaku integritas yang dimulai sejak individu berada dalam lingkungan keluarga dan pendidikan. Perilaku tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari bukanlah korupsi dalam pengertian hukum, tetapi merupakan persoalan integritas yang perlu diperhatikan apabila terus dinormalisasi dan dibenarkan oleh lingkungan sosial. Berdasarkan kajian terhadap jurnal-jurnal Indonesia, perilaku tidak jujur berkaitan dengan beberapa faktor psikologis, antara lain moral disengagement, norma sosial, tekanan lingkungan, serta proses pembentukan kesadaran moral. Penelitian Surongku dkk., (2025) dan Najarani dkk., (2025) menunjukkan relevansi mekanisme pelepasan moral dalam menjelaskan ketidakjujuran akademik. Sementara itu, Manara dkk., (2024) memperlihatkan pentingnya norma sosial dalam memahami perilaku korupsi.

Selain faktor individu, keluarga dan lembaga pendidikan memiliki peran dalam membangun kebiasaan integritas. Penelitian Sakban dkk., (2024) dan Zulaiha & Munir, (2025) memperlihatkan pentingnya pendidikan antikorupsi, pembiasaan, serta penguatan karakter dalam lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi perlu melampaui pemberian pengetahuan mengenai aturan dan sanksi. Penguatan identitas moral, pembiasaan perilaku jujur, keteladanan, refleksi moral, dan lingkungan yang mendukung integritas merupakan bagian penting dari proses pencegahan.

Pada akhirnya, budaya antikorupsi tidak hanya dibentuk melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui individu yang mampu mempertahankan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam berbagai situasi. Pencegahan korupsi perlu dimulai sebelum seseorang memiliki jabatan atau kekuasaan, yaitu sejak nilai integritas dibentuk dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun saran untuk pencegahan korupsi perlu dimulai dari lingkungan keluarga melalui pembiasaan sikap jujur, tanggung jawab, dan keteladanan. Lembaga pendidikan juga perlu memperkuat pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran karakter dan pembentukan budaya akademik yang berintegritas. Selain itu, generasi muda diharapkan menerapkan kejujuran dalam kehidupan akademik maupun sosial. Masyarakat dan pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang menjunjung transparansi, akuntabilitas, serta penegakan aturan secara konsisten. Peneliti selanjutnya disarankan mengembangkan penelitian empiris mengenai hubungan moral disengagement, norma sosial, dan kesadaran moral dengan perilaku integritas.

DAFTAR REFERENSI

Badan Pusat Statistik. (2024). Indeks perilaku anti korupsi 2024. https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/06/66e636bc0a8fa4f90e0d6c6d/indeks-perilaku-anti-korupsi-2024.html

Farisandy, E. D., & Putri, I. (2024). I'm tired with the task!: Gambaran deskriptif ketidakjujuran akademik pada mahasiswa Prodi Psikologi di Universitas X. Jurnal Psikologi Udayana, 11(1). https://doi.org/10.24843/JPU.2024.v11.i01.p02

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024. https://aclc.kpk.go.id/pendidikan/spipendidikan/hasil/2024?level=nasional&map_by=indeks_total&view_mode=focused

Manara, M. U., Widodo, R. W., Hidayatullah, M. S., & Mardhiah. (2024). Descriptive norms and corruption: Examining the moderating role of ethical leadership. Jurnal Psikologi, 23(2), 120–128. https://doi.org/10.14710/jp.23.2.120-128

Najarani, R. A., Pratitis, N. T., & Kusumandari, R. (2025). Moral disengagement dan academic dishonesty pada mahasiswa. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(2), 28767–28771. https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.31541

Nursalim, N., Sasmita, W., Fauziah, H. U., Andyastuti, E., Widodo, A., & Suratman. (2025). Penanaman pola asuh dan keteladanan orang tua terhadap pembentukan nilai anti korupsi anak di keluarga. Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru, 10(3), 2130–2139. https://doi.org/10.51169/ideguru.v10i3.2106

Sakban, A., Budimansyah, D., Darmawan, C., Syaifullah, S., & Sundawa, D. (2025). Personality habituation through anti-corruption education in higher education: Fostering integrity and moral character. Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan, 16(2), 232–242. https://doi.org/10.31764/paedagoria.v16i2.29285

Surongku, S. J., Taibe, P., & Gismin, S. S. (2025). Musuh yang tak terlihat: Moral disengagement dan erosi integritas akademik di Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Jurnal Psikologi Karakter, 5(2), 376–383. https://doi.org/10.56326/jpk.v5i2.7099

Zulaiha, A. R., Hernawan, A. H., & Dewi, L. (2025). The effect of anti-corruption character education on educational integrity. Inovasi Kurikulum, 22(1), 133–146. https://doi.org/10.17509/jik.v22i1.77126